

Nomor : B/443/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

3 September 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kota Manado**
di
Manado

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kota Manado, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Manado. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada tingkat instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Manado;
- b. Melakukan reviu dokumen pohon kinerja pada Perangkat Daerah (PD) dengan merujuk kepada masing-masing kinerja utamanya;
- c. Menetapkan Keputusan Walikota Manado Nomor: 197/Kep/010/Setda/2024 Tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan Dan Hukuman Dalam Rangka Pencapaian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Manado.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Manado menunjukkan nilai **72,06** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Sangat Baik**", yaitu mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	23,42	23,70
2. Pengukuran Kinerja	30	20,76	21,36
3. Pelaporan Kinerja	15	10,85	10,91
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,36	16,09
Nilai Hasil Evaluasi	100	70,39	72,06
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Manado tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dalam perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Keselarasan antara dokumen perencanaan daerah belum sepenuhnya terjaga karena belum selarasnya antara ketentuan di dalam Peraturan

Walikota Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Manado dengan Perjanjian Kinerja Walikota 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- b. Penjenjangan kinerja pada tingkat Pemkot sudah dilakukan perbaikan agar sesuai dengan prinsip perjenjangan kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, namun perbaikan penjenjangan kinerja masih perlu dicermati karena masih terdapat beberapa *critical success factor* (CSF) belum tepat teridentifikasi.

2) Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- Pemanfaatan aplikasi SIPEKA masih rendah karena masih banyak PD yang belum melakukan pemutakhiran data kinerja pada aplikasi tersebut, contoh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan masih belum melakukan *update data*.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kota Manado telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 di tingkat Pemkot dan tingkat PD. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya:

- a. Laporan kinerja PD belum seluruhnya menyampaikan informasi analisa yang memadai, yaitu terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per pencapaian kinerja yang dimiliki;
- b. Informasi dalam pelaporan kinerja belum sepenuhnya dapat diyakini, karena masih ditemukan kesalahan informasi dalam laporan kinerja yang dipublikasikan. Contoh pada laporan kinerja Dinas Ketenagakerjaan pada indikator “Angka Pengangguran terbuka” target 12%, realisasi 8,85% dengan capaian 73,75%. Indikator tersebut seharusnya semakin kecil capaiannya semakin baik namun dilaporkan sebaliknya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pemerintah Kota Manado telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP pada PD. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di

antaranya sebagai berikut:

- a. Belum seluruh PD menyampaikan laporan hasil evaluasinya sehingga belum menggambarkan keseluruhan kualitas implementasi SAKIP di Pemerintah Kota Manado;
- b. Masih terdapat beberapa PD yang salah melaporkan dokumen rencana aksi untuk pencapaian dengan dokumen lain yang tidak ada korelasinya. Contoh Dinas Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: contoh

- 1) Mereviu kembali keselarasan dokumen perencanaan kinerja pada tingkat pemerintah daerah, sehingga dapat menjawab seluruh kinerja utama perangkat daerah;
- 2) Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan CSF yang mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Memastikan pemanfaatan aplikasi yang dimiliki dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja, agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja secara berkala dan *real time* baik di tingkat Pemkot maupun PD;
- 4) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada tingkat Pemkot dan PD sehingga dapat menyajikan informasi secara detail per-pencapaian kinerja terkait analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisa upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja ke depan;
- 5) Menyempurnakan rencana aksi pada PD agar lebih menggambarkan pelaksanaan aksi yang mendukung kinerja pada tingkat di atasnya dan didukung dengan target periodik serta monitoring atas pelaksanaannya;
- 6) Mendorong Inspektorat Kota Manado untuk melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil evaluasi internal kepada perangkat daerah sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja bagi PD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP yang telah dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Manado. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Manado dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sulawesi Utara;
4. Walikota Manado.